

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA PONGONGAILA KECAMATAN PULUBALA KABUPATEN GORONTALO

Tety Thalib¹, Andi Yusuf Katili²
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
tetytha30@gmail.com¹, yusuf2801@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah, sistem pendataan, verifikasi, dan pengawasan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan, observasi dan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian tentang sistem pendataan Program Keluarga Harapan di Desa Pongongaila belum optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang memenuhi syarat dan kriteria Program Keluarga Harapan (PKH) tetapi tidak terdata, sebaliknya masyarakat yang taraf hidup lebih baik tetapi terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan. Sistem verifikasi Program PKH di Desa Pongongaila belum optimal. Hal ini terlihat dari tidak transparannya petugas dalam melakukan kegiatan verifikasi yang menimbulkan kecurigaan masyarakat khususnya masyarakat yang tidak lolos verifikasi. Pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) belum optimal. Hal ini terlihat dari banyak pelanggaran dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), baik pelanggaran yang dilakukan oleh petugas dalam melakukan pendataan ataupun verifikasi maupun pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) seperti penyalahgunaan dana bantuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Disarankan, perlunya upaya perubahan dalam sistem pendataan khususnya pada petugas dengan melibatkan orang-orang independen atau petugas yang berasal dari luar Desa Pongongaila. Perlunya dilakukan upayan yang terbuka dan jujur dalam sistem verifikasi berkas calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Perlunya dilakukan pengawasan secara tuntas dengan melakukan pengecekan kebenaran atas kondisi yang dialami oleh masyarakat calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Kata Kunci: **Implementasi; Keluarga; Harapan**

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Pongongaila Village, Pulubala District, Gorontalo Regency. The research method uses a descriptive type of qualitative approach. The focus of this research is the data collection

system, verification, and supervision. Data collection techniques carried out through in-depth interviews with a number of informants, observation, and recording of secondary data relating to research problems. The results of research on the Family Hope Program data collection system in Pongongaila Village are not optimal. This can be seen from the number of people who meet the requirements and criteria of the Family Hope Program (PKH) but are not recorded, on the contrary, the people who live better but are registered as participants of the Family Hope Program. The PKH Program verification system in Pongongaila Village is not yet optimal. This can be seen from the non-transparency of officers in carrying out verification activities which raises public suspicion, especially those who do not pass verification. Supervision carried out by the Family Hope Program Implementation Unit (UPPKH) is not optimal. This can be seen from many violations in the implementation of the Family of Hope Program (PKH), both violations committed by officers in conducting data collection or verification as well as violations committed by recipients of the Family of Hope Program (PKH) such as misuse of aid funds that are not in accordance with their designation. It is recommended, the need for changes in the data collection system, especially for officials by involving independent people or officers from outside the village of Pongongaila. The need for open and honest efforts in the file verification system of prospective beneficiaries of the Family Hope Program (PKH). The need for complete supervision by checking the truth of the conditions experienced by prospective beneficiaries of the Family Hope Program (PKH) assistance

*Keyword: **Implementation; Family; Hope***

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang memiliki penduduk terbesar ke empat di dunia. Memiliki populasi penduduk yang sangat besar membuat Indonesia memiliki banyak sekali persoalan-persoalan rumit yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk dalam hal pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan seringkali dipahami dalam pengertian yang sangat sederhana yaitu sebagai keadaan kekurangan uang, rendahnya

tingkat pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup sehari-hari.

Berbagai cara telah ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin yang disebut sebagai Bantuan Sosial atau (Bansos). Bansos ini dalam bentuk bantuan tunai maupun bantuan material. Bansos diantaranya adalah seperti dana BOS, Jamkesmas, PNPM-Mandiri, Raskin, Bantuan Lansung Tunai, Program Keluarga Harapan dan lain-lain.

Kebijakan program Bantuan Sosial di Indonesia menjadi sangat penting, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Negara berkewajiban atau bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bantuan sosial adalah merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bansos difokuskan untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat agar terlepas dari permasalahan rantai kemiskinan yang berkepanjangan, mendorong dan mempercepat pertumbuhan masyarakat miskin menjadi masyarakat produktif, mandiri, sejahtera dengan memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan yang sudah ada.

Pemerintah selalu memberikan perhatian dan tanggung jawab terhadap perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat miskin. Untuk memberikan keabsahan sistem perlindungan sosial di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, cukup jelas tercatat dalam bab 1 (pasal 1) perlindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan mengatasi resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan

hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Salah satu kebijakan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin. Sebagai imbalanya rumah tangga sangat miskin diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama program keluarga harapan adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin dengan memberikan bantuan dana tunai bersyarat bagi keluarga miskin dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu.

Program keluarga harapan (PKH) membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga yang sangat miskin seraya berinvestasi bagi generasi masa depan melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan. Namun kenyataannya adalah, masih banyak daerah di Indonesia yang belum mampu memanfaatkan program keluarga harapan dengan baik sehingga program keluarga harapan tidak terimplementasikan sesuai dengan harapan dan hanya mampu dinikmati oleh segelintir orang. Tak terkecuali pada wilayah Indonesia bagian timur yang lebih tepatnya ada di Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo .

Program Keluarga Harapan (PKH) telah berlangsung sejak tahun 2007 sampai sekarang, termasuk di Desa Pongongalia Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. Sejak tahun 2007 hingga tahun 2017, Desa Pongongalia Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo selalu aktif menjadi sasaran dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Implementasi Program Keluarga Harapan yang seyogyanya memberikan harapan baru bagi masyarakat Desa Pongongalia khususnya dalam memmanifestasi masa depan yang lebih baik, nyatanya tidak bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat miskin yang menjadi sasaran dari program tersebut. Berdasarkan observasi awal penulis, masih terdapat beberapa persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Pongongalia Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo di antaranya;

Pertama, belum optimalnya system pendataan yang dilakukan oleh petugas PKH. Diindikasikan bahwa selama ini para petugas PKH khususnya bagian pendataan, melakukan diskriminasi yakni melakukan pendataan dengan mendahulukan keluarga, kerabat dan orang-orang terdekat. Selanjutnya bahwa pendataan dilakukan oleh petugas tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang ada. Hasilnya adalah, orang-orang yang menjadi sasaran dari program keluarga harapan tidak terdata, yakni keluarga yang betul-betul hidup dalam kemiskinan. Kedua adalah belum optimalnya kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh petugas PKH. Sejauh ini

verifikasi dilakukan berdasarkan data yang fiktif dan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Petugas PKH lebih cenderung menggunakan data lama dan tidak melakukan verifikasi ulang dari berkas-berkas masyarakat. Banyaknya penerima program bantuan PKH yang tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan merupakan bentuk dari lemahnya kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh petugas. Ketiga adalah lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) terhadap pelaksanaan program PKH. Selama ini Kepala Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) tidak melakukan cek secara langsung tentang situasi di lapangan. Kepala Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) hanya menerima laporan dari petugas sehingga tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pongongalia Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pongongalia Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo.

Fokus Penelitian

Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, maka penelitian ini difokuskan pada:

Sistem Pendataan

Yang dimaksud dengan sistem pendataan dalam penelitian ini adalah melakukan pendataan terhadap para penerima PKH sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Sistem Verifikasi

Yang dimaksud dengan verifikasi dalam penelitian ini adalah transparannya petugas dalam melakukan kegiatan verifikasi agar tidak ada masyarakat yang terlewat sesuai dengan ketentuan.

Pengawasan

Yang dimaksud dengan pengawasan dalam penelitian ini adalah agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan PKH yang menyebabkan penyalahgunaan dana bantuan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif oleh Mochtar (2008:76) dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif adalah menggambarkan berbagai fenomena informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian secara menyeluruh secara faktual dan akurat sebagaimana adanya. Sedangkan pendekatan kualitatif menurut Williams (dalam Usman dan Akbar, 2008:78) dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif, mengemukakan

bahwa pendekatan kualitatif adalah pengumpulan data yang disugukan dalam bentuk informasi pada latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, digunakan 2 (dua) macam data, yaitu:

Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya diambil dan dicatat pertama kalinya (Marzuki, 2007:55). Pada tugas akhir ini data primer yang diperoleh dengan cara memperoleh data melalui informan kunci

Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dimana teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari literature-literature, pencatatan perkuliahan, sumber-sumber lain.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang diperlukan pada penelitian ini, maka dilakukan melalui cara sebagai berikut :

Observasi

Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan langsung yang dilakukan peneliti terhadap objek penelitian. Setiap data yang diamati tidak sekedar dilihat tetapi langsung diperhatikan, jika perlu ditanya dan dicatat segala sesuatunya.

Wawancara

Metode wawancara merupakan metode yang paling luas digunakan dimana-mana untuk memperoleh informasi dari orang

banyak. Menurut Arikunto (dalam Rahmawati, 2009:25) menyatakan bahwa wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan informasi yang ingin didapatkan dan terwawancara menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dialog atau percakapan ditunjukkan melalui kegiatan ini. Terdapat *feedback* atau respons antara orang yang satu dengan yang lain.

Dokumentasi

Dokumen yaitu menghimpun data dan informasi melalui dokumen atau catatan-catatan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Teknik Analisis Data

Adapun teknik yang digunakan untuk menganalisis data mengacu pada pendapat Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013:337), yaitu:

Reduksi data

Mereduksi data mencakup usaha-usaha merangkum hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Penyajian data

Data yang dikumpulkan dapat dinarasikan dengan didasarkan pada kondisi yang ada dilokasi penelitian.

Verifikasi

Verifikasi data dimaksudkan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan yang digulirkan oleh Kementerian Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan yang baik dalam memberikan kontribusi sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan. Berkaitan dengan Program Keluarga Harapan (PKH), tujuan yang terdapat dalam pelaksanaan program ini sangat jelas dan detail.

Dalam pelaksanaannya, Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pongongaila ini yang menjadi sasaran utama adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Namun dalam pelaksanaannya banyak ditemui masalah mulai dari sistem pendataan, verifikasi hingga pengawasannya. Berikut adalah uraian pembahasan terkait dengan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan pedoman umum program keluarga harapan, target penerima bantuan program keluarga harapan adalah rumah tangga sangat miskin. Penetapan rumah tangga sebagai

rumah tangga miskin dilakukan dengan menggunakan metodologi dan indikator yang transparan. Rumah tangga yang berpotensi dipilih sebagai calon peserta program keluarga harapan adalah rumah tangga dengan kategori sangat miskin, dan terdapat anggota keluarga yang terdiri dari ibu hamil, ibu nifas, anak-anak yang berusia dibawah 15 tahun atau lebih dari 15 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Untuk memastikan tercapainya sasaran dari Program Keluarga Harapan (PKH), maka dilakukan pendataan sebagai upaya petugas PKH untuk mencatat dan memasukkan nama calon penerima program keluarga harapan (PKH) yang sesuai dengan ketentuan dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis dapat diketahui bahwa sistem pendataan Program PKH di Desa Pongongaila belum optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang sesuai dengan syarat dan kriteria Program Keluarga Harapan (PKH) tetapi tidak terdata, namun sebaliknya banyak masyarakat yang secara taraf hidup lebih baik tetapi terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan.

Setelah dilakukan pendataan oleh petugas, maka langkah selanjutnya adalah verifikasi. Kegiatan verifikasi dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan menjaga nawacita dari Program Keluarga Harapan (PKH). Verifikasi sendiri berarti suatu konfirmasi yang dilakukan dengan menyediakan dengan bukti yang objektif yang menunjukkan bahwa persyaratan telah dipenuhi. Jika berbicara mengenai

masalah verifikasi ini, memang verifikasi banyak dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan dan salah satu aspek yang paling sering menggunakan verifikasi ialah ketika berhubungan dengan pendaftaran.

Dalam penelitian ini kemudian ditafsirkan bahwa, verifikasi adalah upaya petugas PKH dalam mengecek kebenaran berkas persyaratan calon penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) secara objektif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis dapat diketahui bahwa sistem verifikasi Program PKH di Desa Pongongaila belum optimal. Hal ini terlihat dari tidak transparannya petugas dalam melakukan kegiatan verifikasi dan pada akhirnya akan menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang dinyatakan tidak lolos verifikasi.

Terakhir adalah tahapan yang tidak kalah pentingnya dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pengawasan. Pengawasan ialah suatu proses untuk menegaskan bahwa seluruh aktifitas yang terselenggara telah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Dalam hal pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) perlu dilakukan pengawasan guna memastikan program keluarga harapan berjalan sesuai dengan maksud, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Demikian halnya dalam penelitian ini bahwa yang dimaksudkan dengan pengawasan adalah upaya oleh pihak petugas untuk memastikan program keluarga harapan (PKH) berjalan sesuai dengan tujuan program keluarga harapan

(PKH). Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis dapat diketahui kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyak pelanggaran dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), baik pelanggaran yang dilakukan oleh petugas dalam melakukan pendataan ataupun verifikasi maupun pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) seperti penyalahgunaan dana bantuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo belum optimal. Hal tersebut dikarenakan masih seringnya terjadi kecurangan dalam proses pendataan, sistem verifikasi berkas yang tidak transparan, dan masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka selanjutnya penulis melakukan simpulan terhadap permasalahan, di antaranya; Sistem pendataan Program PKH di Desa Pongongaila belum optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang sesuai dengan syarat dan kriteria Program Keluarga Harapan (PKH) tetapi tidak terdata, namun sebaliknya banyak masyarakat yang secara taraf hidup lebih

baik tetapi terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan.

Sistem verifikasi Program PKH di Desa Pongongaila belum optimal. Hal ini terlihat dari tidak transparannya petugas dalam melakukan kegiatan verifikasi dan pada akhirnya akan menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang dinyatakan tidak lolos verifikasi.

Pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyak pelanggaran dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), baik pelanggaran yang dilakukan oleh petugas dalam melakukan pendataan ataupun verifikasi maupun pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) seperti penyalahgunaan dana bantuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

SARAN

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

Perlunya upaya perubahan dalam sistem pendataan khususnya pada petugas dengan melibatkan orang-orang independen atau petugas yang berasal dari luar Desa Pongongaila

Perlunya dilakukan upayan yang terbuka dan jujur dalam sistem verifikasi berkas calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Perlunya dilakukan pengawasan secara tuntas dengan melakukan pengecekan kebenaran atas kondisi yang dialami oleh

masyarakat calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Perlunya dilakukan upaya yang komperhenship (menyeluruh) dalam memaksimalkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pongongaila dengan melakukan pendataan secara adil, verifikasi secara terbuka dan jujur serta mengoptimalkan kegiatan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Arifin, 2011. *Komunikasi Politik*. PT. Balai Pustaka. Jakarta
- A.W. Widjaja. 2009. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Albi. 2008. *Adat Budaya Resan Melayu Batubara*. Bandung: PT. Puri Delco.
- Barry, C., & Derek, L. 2010. *Organizational behaviour and design: perilaku dan desain organisasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Calden Gerald. 2007. *Administrative Reforms Comes of Ages*. Walter The Gruyter
- Creswell, John W. 2010. *Research Design, Pendekatan Kualitatif Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Devito. Joseph A. 2009. *Komunikasi Antar Manusia (Alih Bahasa: Agus Maulana)*. Jakarta: Professional Books
- Effendy, Onong Uchjana. 2009. *Komunikasi teori dan praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Glueck, William F. & Lawrence R. Jauch, 2006. *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan. Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Keban, Y. 2008. *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik*. Konsep Teori dan Isu. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. Kedua, Bandung: PT. Remadja Rosdakarya
- Muhammad & Mona Ganiem, laila. 2010. *Teori Komunikasi Antarpribadi*. Jakarta: Kencana.
- Mulyana Deddy. 2010. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nawawi, H. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gajah Mada Univercity Press,
- Riduwan. 2005. *Metode & Teknik Menyusun Tesis*. Pengantar Kata Buchari Alma. Cet. Ketiga. Bandung: Alfabeta.
- Rivai. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Edisi Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, Zauhar. 2008. *Reformasi Administrasi; Konsep, Dimensi & Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Stoner, James A.F. 2007. *Manajemen Komunikasi*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Ed.

- Revisi. Cet. Ke -10. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sunarto. 2013. *Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Utomo, Waristo. 2007. *Administrasi Publik Baru Indonesia*. Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widjaya, H.A.W. 2009. *Ilmu Komunikasi*. Ed Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wilson, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.

Sumber Lain;

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan